

## **ABSTRAK**

### **Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman**

**Pandu Ariyantono  
5160111145**

Laporan tugas akhir ini membahas tentang pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Sleman. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.. Kegiatan pengadaan (*procurement*) ini yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai menggunakan anggaran (APBN/APBD) maka instansi dituntut untuk mematuhi peraturan yang berlaku guna mendapatkan barang/jasa yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Tujuan laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Sleman. Objek penelitian ini adalah semua informasi yang didapatkan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi selama melakukan penelitian studi kasus di instansi. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, dengan metode analisis ini dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di instansi. Hasil dari analisis pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) adalah Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Sleman dalam melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) sudah menggunakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Sejak tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Sleman sudah tidak dilakukan dengan cara konvensional lagi tetapi sudah dilakukan secara elektronik. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*e-procurement*) bertujuan untuk mempercepat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mencapai prinsip pengadaan. Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Sleman masih terdapat beberapa faktor penghambat yaitu struktur organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang masih *ad hoc*, sedikitnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki sertifikasi pengadaan, persiapan pengadaan yang kurang matang dan sering terjadinya gagal lelang. Akibat faktor penghambat diatas terhadap kegiatan pelaksanaan pengadaan tersebut membuat penyerapan anggaran pada Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Sleman menjadi lemah karena hanya mampu menggunakan anggarannya sebanyak Rp23.119.785.743,00 atau sebesar 22,77% dari total anggaran yang disediakan untuk instansi pada tahun 2020.

Kata Kunci: Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Faktor Penghambat Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Penyerapan Anggaran.

## **ABSTRACT**

### ***Implementation of the Procurement of Government Goods /Services at the Regional Secretariat of Sleman Regency***

**Pandu Ariyantono  
5160111145**

*This final report discusses the implementation of the Procurement of Goods/Services (PBJ) at the Regional Secretariat (SETDA) of Sleman Regency. Government Procurement of Goods/Services (PBGP) is regulated in Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods/Services. This procurement activity is carried out by Ministries/Institutions/Regional Apparatuses which are financed Using the budget (APBN/APBD), agencies are required to comply with applicable regulations in order to obtain quality goods/services that can be utilized by the wider community. The purpose of this final report is to find out how the implementation of the Procurement of Goods/Services (PBJ) at the Regional Secretariat (SETDA) of Sleman Regency. The object of this research is all information obtained through observation, interviews and documentation during case study research in the agency. The data analysis method used by the author is descriptive qualitative, with this analysis method can provide a clear picture of the implementation of the Procurement of Goods/Services (PBJ) in the agency. The results of the analysis of the implementation of the Procurement of Goods/Services (PBJ) are that the Regional Secretariat (SETDA) of Sleman Regency in carrying out the activities of the Procurement of Goods/Services (PBJ) has used Presidential Regulation Number 12 of 2021. Since 2010 the Procurement of Goods/Services (PBJ) at the Secretariat The Regional Secretariat (SETDA) of Sleman Regency is no longer carried out in the conventional way but has been carried out electronically. The implementation of electronic procurement of goods/services (e-procurement) aims to accelerate the improvement of service quality and achieve procurement principles. In the implementation of the Procurement of Goods/Services (PBJ) at the Regional Secretariat (SETDA) of Sleman Regency, there are still several inhibiting factors, namely the organizational structure of the Goods/Services Procurement Unit (UKPBJ) which is still ad hoc, at least Human Resources (HR) who have procurement certification, inadequate procurement preparation and frequent auction failures. As a result of the above inhibiting factors on the procurement implementation activities, the absorption of the budget at the Regional Secretariat (SETDA) of Sleman Regency becomes weak because it is only able to use its budget of Rp. 23,119,785,743.00 or 22.77% of the total budget provided for agencies in 2020.*

**Keywords:** *Implementation of Procurement of Goods/Services (PBJ), Inhibiting Factors for Procurement of Goods/Services (PBJ), Budget Absorption.*